

# PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pemalang



Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang,  
Kode Pos 52312 Telp. (0284) 324657  
Pemalang

## KATA PENGANTAR

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpusarda) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 sampai dengan triwulan II serta perubahan rencana kerja dan pendanaan.

Perubahan Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran, program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai setelah disesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama tahun berjalan.

Perubahan Renja Dinpusarda Kabupaten Pemalang menjadi pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Pemalang, Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PEMALANG  
Kepala Bidang Arsip



MUNG SUPRIATIN, S.E., M.Si  
Pembina  
NIP. 19660515 199301 2 001

## DAFTAR ISI

halaman

---

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4 Sistematika Penyusunan .....	I-6
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	II-7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	III-30
BAB IV PENUTUP .....	IV-48

## DAFTAR TABEL

halaman

---

Tabel 2.1 Status Capaian Kinerja dan Anggaran .....	II-8
Tabel 2.2 Evaluasi Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II .....	II-10
Tabel 2.3 Evaluasi Indikator Kinerja Dinpusarda Triwulan II Tahun 2022 ..	II-26
Tabel 3.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2022 .....	III-33

T. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 356 menyatakan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pembangunan daerah merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan permasalahan dan isu strategis yang ada. Penyesuaian kebijakan daerah serta dinamika kondisi perekonomian menyebabkan perencanaan pembangunan perlu disesuaikan juga. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Pengesahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Sehubungan adanya perkembangan, terutama penyesuaian terhadap proyeksi kerangka ekonomi makro daerah, proyeksi kerangka pendanaan, pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka Peraturan Bupati tersebut perlu disesuaikan. Saat ini telah terbit Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan. Perubahan Renja tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada tahun 2022 perlu disusun perubahan terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022 hal ini disebabkan karena :

1. Penyesuaian Program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di RKPD tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021-2026;
2. Penyesuaian target kinerja kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2021

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
  - Pengumpulan materi hasil evaluasi capaian Renja sampai dengan triwulan II tahun 2022
  - Pengumpulan materi perubahan RKPD tahun 2022
2. Penyusunan rancangan
  - Dilakukan setelah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menerima Surat Edaran Bupati Pematang Jaya Nomor 050/ 2356/Bpp Tanggal 29 Juli 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Pematang Jaya.
  - Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2022
3. Perumusan rancangan akhir
  - Penyempurnaan rancangan perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022
  - Diverifikasi oleh Bappeda
4. Penetapan
  - Bersama dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022, berdasarkan Peraturan Perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 23);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022.
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan;
2. Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2022, faktor-faktor penyebab status capaian kinerja sangat rendah dan rendah;
3. Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan perubahan Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya;
4. Bab IV Penutup, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpusarda) Kabupaten Pemalang merupakan instansi pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Dinpusarda mempunyai 2 (dua) tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021-2026, yaitu **“Meningkatkan Budaya Literasi di Masyarakat”** yang diukur dengan indikator **nilai budaya literasi** dengan rumusan rerata dari persentase penduduk yang membaca baik cetak maupun elektronik, persentase penduduk yang mengakses internet, dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/taman baca masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu **“Meningkatkan birokrasi akuntabel”** yang diukur dengan indikator **indeks kearsipan** yang merupakan penilaian dari ANRI meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan kearsipan internal.

Sasaran jangka menengah Dinpusarda Kabupaten Pemalang yang akan dicapai selama tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. **“Meningkatnya Budaya Literasi di Masyarakat”** yang diukur dengan **indikator indeks pembangunan literasi masyarakat**. Unsur pembangunan literasi masyarakat, meliputi pemerataan, layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan anggota perpustakaan.
2. **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan”** yang diukur dengan indikator **persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik** dengan rumusan jumlah OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik dibagi jumlah OPD dikali 100%
3. **“Meningkatnya Pelayanan Kinerja Dinpusarda”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap kinerja Dinpusarda yang diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pengunjung perpustakaan.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses

penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dengan menghitung realisasi kinerja dan anggaran dibandingkan dengan targetnya. Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 status capaian kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Status Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	47,50% ≤	Sangat tinggi (ST)
2	38,76% ≤ 47,50%	Tinggi (T)
3	31,26 ≤ 38,75%	Sedang (S)
4	22,51% ≤ 31,25%	Rendah (R)
5	≤ 22,50%	Sangat Rendah (SR)

Pada APBD Penetapan Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022 Dinpusarda mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.563.383.000 untuk membiayai 4 program dan 11 kegiatan serta 31 sub kegiatan. Terdiri dari anggaran rutin operasional sebanyak Rp. 1.249.198.000 dan gaji beserta tunjangan sebesar Rp. 3.314.185.000.

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar Rp. 2.108.994.756 atau sebesar 46,22 % dari total anggaran 2022. Penyerapan anggaran sebesar 46,22% masuk pada kategori tinggi (T) hal ini disebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan pada triwulan berikutnya serta dilakukan pengeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan. Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar 66,43%. Realisasi kinerja sebesar 66,43% tersebut masuk pada kategori sangat tinggi (ST).

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinpusarda Kabupaten Pematang Hari. Berikut ini disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinpusarda Kabupaten Pematang Hari Triwulan II Tahun 2022 secara lebih rinci hingga sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2.2

## Evaluasi Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Dinpusarda Kabupaten Pemalang

No	Kode Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran (TAHUN 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Pada Triwulan (TAHUN 2022)										Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD TW II (TAHUN 2022) (%)		Status Capaian	Keterangan
					Penetapan		I		II		III		IV		TOTAL					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		(10=6+7+8+9)		(11=10/5*100)		12	13
			Indikator	Satuan	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.928	4.563.383.000	1.626	947.256.660	5.634	1.161.738.096	-	-	-	-	7.260	2.108.994.756	66,43	46,22	T	
	2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			7.868	4.488.383.000	564	938.218.110	4.628	1.157.550.196	-	-	-	-	5.192	2.095.768.306	65,99	46,69	T	Beberapa kegiatan yang realisasi kinerja berada pada TW II & TW III
	2.23 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SAKIP	Skor	48,60	4.213.383.000	-	894.563.360	-	1.090.146.196	-	-	-	-	-	1.984.709.556	0,00	47,10	T	Beberapa kegiatan yang realisasi kinerja berada pada TW IV
			IRB	Skor	56,52		44,29							44,29			78,36		T	

	2.23 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.280.284		13.458.750		6.389.900		-		-		19.848.650		37,97		
		Keluran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	10		4		-		-		-		4		40,00		S	
		Hasil Kegiatan	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	%	100		40								40		40,00		S	
	2.23 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	2	10.000.000	0	3.201.500	0	385.500					0	3.587.000	0,00	35,87	S	Realisasi Kinerja dilaksanakan pada Triwulan III

2.23 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	dokume n	1	5.000.000	0	2.812.500	0	468.900					0	3.281.400	0,00	65,63	ST	
2.23 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun	dokume n	1	5.000.000	0	0	0	920.000					0	920.000	0,00	18,40	SR	Realisasi Kinerja dilaksana kan pada Triwulan III
2.23 . 01 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah DPA SKPD yang tersusun	dokume n	1	4.999.772	0	2.456.000	0	0					0	2.456.000	0,00	49,12	ST	
2.23 . 01 . 2.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah perubahan DPA SKPD yang tersusun	dokume n	1	5.000.000	0	0	0	975.000					0	975.000	0,00	19,50	SR	Realisasi Kinerja dilaksana kan pada Triwulan III
2.23 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokume n	3	5.000.000	3	2.427.750	0	1.009.500					3	3.437.250	100,00	68,75	ST	
2.23 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokume n	1	17.280.512	1	2.561.000	0	2.631.000					1	5.192.000	100,00	30,05	R	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentria n di aplikasi FMIS
<b>2.23 . 01 . 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>3.321.895.000</b>		<b>719.071.907</b>		<b>903.565.615</b>						<b>1.622.637.522</b>		<b>48,85</b>		

		<b>Keluran Kegiatan</b>	<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>dokumen</b>	2		1		-					1		50,00		ST	
		<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Presentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel</b>	<b>%</b>	100		50		-					50		50,00		ST	
	2.23 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayar Gaji dan Tunjangan ASN	orang	25	3.314.185.000	23	714.662.907	23	903.565.615				23	1.618.228.522	92,00	48,83	ST	-
	2.23 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.460.000	1	4.409.000	0	0				1	4.409.000	100,00	98,86	ST	-
	2.23 . 01 . 2.02 . 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dokumen	1	3.250.000	0	0	0	0				0	0	0,00	0,00	SR	Realisasi kinerja pada TW III & IV
	<b>2.23 . 01 . 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>206.061.200</b>		<b>44.585.242</b>		<b>30.955.000</b>					<b>75.540.242</b>		<b>36,66</b>		



		<b>Keluran Kegiatan</b>	<b>jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>layanan</b>	6		6		6					6		100,00		S	
		<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Presentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memerlukan car pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	100		100		100					100		100,00		S	
	2.23 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis	8	5.000.000	4	2.230.000	4	1.685.000				8	3.915.000	100,00	78,30	ST	-
	2.23 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	19	7.554.700	19	1.109.500	19	1.179.150				19	2.288.650	100,00	30,29	R	karena kegiatan belum berjalan optimal
	2.23 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis	3	104.650.500	1	14.764.742	1	18.114.100				2	32.878.842	66,67	31,42	S	karena kegiatan belum berjalan optimal
	2.23 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis barang cetakan	jenis	8	18.053.500	8	1.111.000		1.767.250				8	2.878.250	100,00	15,94	SR	Karena kegiatan belum berjalan optimal

			yang tersedia															
			jenis penggandaan yang tersedia	lembar	7.000		200		4300				4.500		64,29		SR	Karena kegiatan belum berjalan optimal
	2.23 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis surat kabar yang tersedia	jenis	8	18.412.500	8	3.613.000	8	3.713.000			8	7.326.000	100,00	39,79	T	-
	2.23 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	105	52.390.000	48	21.757.000	27	4.496.500			75	26.253.500	71,43	50,11	ST	-
	<b>2.23 . 01 . 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>422.590.000</b>		<b>78.522.711</b>		<b>102.341.206</b>				<b>180.863.917</b>		<b>42,80</b>		
		<b>Keluran Kegiatan</b>	<b>jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</b>	<b>jasa</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>3</b>			<b>3</b>			<b>100,00</b>		<b>T</b>	

		<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>					<b>100</b>		<b>100,00</b>		<b>T</b>	
	2.23 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat dinas yang terkirim	surat	500	4.590.000	200	600.000	100	476.500				300	1.076.500	60,00	23,45	R	karena kegiatan belum berjalan optimal
	2.23 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis	4	100.000.000	4	24.923.311	4	22.653.706				4	47.577.017	100,00	47,58	ST	-
	2.23 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga non ASN yang dibayar tiap bulan	orang	23	318.000.000	23	52.999.400	23	79.211.000				23	132.210.400	100,00	41,58	T	-
	<b>2.23 . 01 . 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>210.556.516</b>		<b>38.924.750</b>		<b>46.894.475</b>					<b>85.819.225</b>		<b>40,76</b>		
		<b>Keluran Kegiatan</b>	<b>jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>unit</b>	<b>48</b>		<b>17</b>		<b>13</b>					<b>30</b>		<b>62,50</b>		<b>T</b>	

		Hasil Kegiatan	Presentase barang milik daerah yang memerlukan cara pelaksanaan tugas	%	100		35		62,5					98		97,92		T	
	2.23 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	24	112.318.620	10	22.713.250	6	23.947.475				24	46.660.725	100,00	41,54	T	-
	2.23 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	22	14.860.000	6	2.640.000	7	3.220.000				13	5.860.000	59,09	39,43	T	-
	2.23 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	unit	2	83.377.896	1	13.571.500	-	19.727.000				1	33.298.500	50,00	39,94	T	-
	<b>2.23. 02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Presentase perpustakaan sesuai standard</b>	<b>persen</b>	<b>2,28</b>	<b>275.000.000</b>	<b>0</b>	<b>43.654.750</b>	<b>1,43</b>	<b>67.404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>111.058.750</b>	<b>62,72</b>	<b>40,39</b>	<b>T</b>	<b>Realisasi kinerja pada TW IV</b>
			<b>Nilai tingkat kegemaran membaca</b>	<b>Skor</b>	<b>55,35</b>		<b>0</b>						<b>-</b>		<b>0,00</b>			<b>T</b>	<b>Realisasi kinerja pada TW IV</b>

			masyarakat																
2.23 . 02 . 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perpustakaan tingkat daerah yang dikelola			131.251.000		37.106.750		43.885.750		0		0		80.992.500		61,71		
	Keluran Kegiatan	Jumlah perpustakaan tingkat daerah yang tersedia	unit	4		4		4						4		100,00		ST	
	Hasil Kegiatan	Presentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	%	100		100		100						100		100,00		ST	
2.23 . 02 . 2.01 . 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten yang berkembang	layanan	4	131.251.000	4	37.106.750	4	43.885.750					4	80.992.500	100,00	61,71	ST	-
2.23 . 02 . 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				143.749.000		6.548.000		23.518.250		-		-		30.066.250		20,92		

		<b>Keluran Kegiatan</b>	<b>jumlah aktivitas pembudayaan gemar membaca</b>	<b>kegiatan</b>	2				1					1		50,00		SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian di aplikasi FMIS
		<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan</b>	<b>%</b>	100				50					50		50,00		SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian di aplikasi FMIS
	2.23 . 02 . 2.02 . 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan yang tersusun	dokumen	1	100.000.000	0	6.548.000	0	7.544.000				0	14.092.000	0,00	14,09	SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian di aplikasi FMIS
	2.23 . 02 . 2.02 . 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan literasi berbasis inklusi sosial	orang	100	43.749.000	0	0	102	15.974.250				102	15.974.250	102,00	36,51	S	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian di aplikasi FMIS
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>			<b>3.060</b>	<b>75.000.000</b>	<b>1.062</b>	<b>9.038.550</b>	<b>1.006</b>	<b>4.187.900</b>	-	-	-	<b>2.068</b>	<b>13.226.450</b>	<b>67,58</b>	<b>17,64</b>	<b>SR</b>	

	2.24 . 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	persen	17,7	65.000.000		9.038.550	42,65	3.887.900		0		0	43	12.926.450	240,96	19,89	SR	Realisasi kinerja pada TW IV
	2.24 . 02 . 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				43.000.000		5.660.050		2.679.400		0		0		8.339.450		19,39		
		Keluran Kegiatan	jumlah arsip dinamis yang terkelola	berkas	500		446		140						586		117,20		SR	
		Hasil Kegiatan	Presentase arsip dinamis yang terkelola	%	100		89,20		117						206		206,40		SR	
	2.24 . 02 . 2.01 . 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan	berkas	500	15.000.000	446	291.450	343						789	291.450	157,80	1,94	SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian di aplikasi FMIS
	2.24 . 02 . 2.01 . 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	berkas	460	14.500.000	180	5.368.600	303	2.081.400					483	7.450.000	105,00	51,38	ST	
			jumlah arsip dinamis yang terpelihara	berkas	46		18		20						38		82,61		ST	

			jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	berkas	46		18	20					38		82,61		ST	
2.24 . 02 . 2.01 . 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	rekomen dasi	5	13.500.000	0	0	0	598.000				0	598.000	0,00	4,43	SR	Kinerja belum terealisasi karena masih dalam proses penyusunan SK Bupati
2.24 . 02 . 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				17.000.000		3.378.500		478.500	0	0		3.857.000		22,69			
	Keluran Kegiatan	jumlah arsip statis yang terkelola	berkas	500		200		53					253		50,60		SR	
	Hasil Kegiatan	Presentase arsip statis yang terkelola	%	100		40		50,6					91		90,60		SR	
2.24 . 02 . 2.02 . 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	berkas	500	17.000.000	200	3.378.500	160	478.500				360	3.857.000	72,00	22,69	SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian di aplikasi FMIS
		jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang	berkas	500		200		160					360		72,00		SR	Realisasi keuangan masih dalam proses pengentrian di aplikasi FMIS



			dipreservas i															
2.24 . 02 . 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kot a				5.000.000		0		730.000		0		0	730.000		14,60		
	Keluran Kegiatan	jumlah aktivitas pengelolaa n simpul jaringan informasi kearsipan	kegiata n	1									0		0,00		SR	Realisasi kinerja sub- kegiatan ya berada pada TW III & IV
	Hasil Kegiatan	Presentase aktivitas pengelolaa n simpul jaringan informasi kearsipan	%	100									0		0,00		SR	Realisasi kinerja sub- kegiatan ya berada pada TW III & IV
2.24 . 02 . 2.03 . 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	jumlah arsip yang dimasukka n dalam JKID melalui SIKD	berkas	3	5.000.000	0	0	0	730.000				0	730.000	0,00	14,60	SR	Realisasi kinerja pada TW III & IV

2.24 . 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberada an dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	persen	6,45	10.000.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0,00	3,00	SR	Beberapa kegiatan yang realisasi berada pada TW III & TW IV
2.24 . 03 . 2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				10.000.000		0		300.000		0		0		300.000		3,00		
	Keluran Kegiatan	jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	berkas	1.000										0		0,00		SR	Realisasi kinerja sub-kegiatan ya berada pada TW III & IV
	Hasil Kegiatan	Presentase arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	%	100										0		0,00		SR	Realisasi kinerja sub-kegiatan ya berada pada TW III & IV

2.24 . 03 . 2.01 . 01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang ditetpkan untuk dimusnahk an	berkas	1.000	10.000.000	0	0	0	300.000				0	300.000	0,00	3,00	SR	Realisasi kinerja pada TW III & IV
--------------------------	--	---	--------	-------	------------	---	---	---	---------	--	--	--	---	---------	------	------	----	---

Berdasarkan tabel 2.2 masih terdapat sub kegiatan yang menunjukkan status capaian kinerja dan keuangan SR dan R. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rencana pelaksanaan yang memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV tahun 2022. Sub Kegiatan tersebut yaitu :
  - a. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
  - b. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD
  - c. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
  - d. Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN
  - e. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun
2. Sudah dilaksanakan namun tertunda administrasi keuangannya karena masih dalam proses pengentrian di aplikasi FMIS, Sub kegiatan tersebut yaitu :
  - a. Evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat – tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
  - c. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial
  - d. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
  - e. Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota
  - f. Akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
3. Belum optimalnya kinerja pada sub kegiatan tertentu dikarenakan adanya pergeseran anggaran kas, yaitu :
  - a. Penyediaan peralatan rumah tangga
  - b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - c. Penyediaan jasa surat menyurat
4. Belum optimalnya kinerja pada sub kegiatan pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota hal ini dikarenakan masih dalam proses penyusunan SK Bupati.

Untuk evaluasi indikator kinerja utama perangkat daerah, indikator kinerja program serta anggaran program sampai triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.

## Evaluasi Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Triwulan II Tahun 2022

Program	Indikator	Satuan	Target Akhir 2026	Target 2022	Anggaran Penetapan (Rp)	Realisasi										Capaian (%)		Status Capaian	Keterangan
						TW I		TW II		TW III		TW IV		Total		K	Rp.		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
IKU	Nilai budaya literasi	%	27,23	24,12		-		-		-		-		0		0		SR	Realisasi kinerja pada TW IV
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8,50	7,30		-		-		-		-		0		0		SR	Realisasi kinerja pada TW IV
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,20	82,00		-		-		-		-		0		0		SR	Realisasi kinerja pada TW IV
	Indeks kearsipan	Indeks	59,12	56,32		-		-		-		-		0		0		SR	Realisasi kinerja pada TW III
	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	100,00	22,50		-		-		-		-		0		0		SR	Realisasi kinerja pada TW III
IKK	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	55,55	55,35		-		-		-		-		0		0		SR	Realisasi kinerja pada TW IV
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8,50	7,30		-		-		-		-		0		0		SR	Realisasi kinerja pada TW IV

	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. Pasal 40 dan pasal 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	17,70	17,70	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	SR	Realisasi kinerja pada TW IV	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	7,74	6,45	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	SR	Realisasi kinerja pada TW IV	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.928	4.563.383.000	1.626	947.256.660	5.014	1.161.738.096	-	-	-	-	6.640	2.108.994.756	60,76	46,22	T	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				7.868	4.488.383.000	564	938.218.110	4.628	1.157.550.196	-	-	-	-	5.192	2.095.768.306	65,99	46,69	T	Beberapa kegiatan yang realisasi kinerja berada pada TW II & TW III

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP	Skor	48,68	48,60	4.213.383.000	-	894.563.360	-	1.090.146.196	-	-	-	-	1.984.709.556	0,00	47,10	T	Beberapa kegiatan yang realisasi kinerja berada pada TW IV	
	IRB	Skor	63,87	56,52		44,29							44,29		78,36		T		
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Presentase perpustakaan sesuai standard	persen	5,66	2,28	275.000.000	0	43.654.750	1,43	67.404.000		0		1	111.058.750	62,72	40,39	T	Realisasi kinerja pada TW IV	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Skor	55,55	55,35		0				0		0			0,00		T	Realisasi kinerja pada TW IV	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				3.060	75.000.000	1.062	9.038.550	386	4.187.900	-	-	-	-	1.448	13.226.450	47,32	17,64	SR	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	persen	17,7	17,7	65.000.000		9.038.550	42,65	3.887.900		0		0	43	12.926.450	240,96	19,89	SR	Realisasi kinerja pada TW IV
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	persen	7,74	6,45	10.000.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0,00	3,00	SR	Beberapa kegiatan yang realisasi kinerja berada pada TW III & TW IV

Berdasarkan tabel 2.3 masih terdapat indikator yang menunjukkan status capaian kinerja dan keuangan SR dan R. Hal tersebut disebabkan karena Rencana pelaksanaan yang memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV tahun 2022. Indikator tersebut yaitu :

- a. Nilai Budaya literasi
- b. Indeks pembangunan literasi masyarakat
- c. Indeks kepuasan masyarakat
- d. Indeks kearsipan
- e. Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik
- f. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
- g. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja
- h. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Intensitas layanan – layanan perpustakaan kepada masyarakat
2. Melakukan publikasi melalui momen edukasi yaitu sosialisasi, bimbingan teknis dan media sosial untuk meningkatkan nilai budaya literasi
3. Untuk mencapai target Indeks pembangunan literasi masyarakat maka yang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi media layanan perpustakaan elektronik, peningkatan koleksi perpustakaan secara bertahap serta penyediaan/pembuatan KTA Perpustakaan secara gratis dan cepat dalam rangka menarik minat masyarakat
4. Membuat SK Tim Pelaksana Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya serta melaksanakan RAOAT Koordinasi terhadap semua tim untuk kegiatan pengawasan kearsipan (indeks kearsipan)
5. Membuat *Time Schedule* kegiatan Audit Kearsipan
6. Melaksanakan Monev Pengelolaan Arsip untuk mengetahui perkembangan OPD yang telah dibina
7. Membuat surat kesediaan bergabung menjadi anggota simpul jaringan kearsipan nasional
8. Mengirimkan profil LKD dan inventaris daftar arsip statis yang ditujukan ke pusat SIKN/JIKN ANRI



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memuat 5 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
    - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
    - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD
  - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pembinaan Perpustakaan
- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - c. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
    - d. Pengembangan Bahan Pustaka
  - 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
    - b. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - c. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- 1) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.
4. Program Pengelolaan Arsip
- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
    - b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
    - c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
  - 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat
    - a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 1) Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
    - a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

- 2) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
  - a. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Adapun rekapitulasi perubahan anggaran tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Perubahan Anggaran Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2022								Cat ata n pe nti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
2																						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																						
2	2 3													4.488.383.000	4.488.383.000					7.635.966.730		
2	2 3	0 1												4.213.383.000	4.213.383.000					5.959.197.800		
2	2 3	0 1	2. 01											52.280.284	52.280.284					86.250.000		
2	2 3	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	3 dokume n	3 dokum en	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	25.000.000
2	2 3	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	1 dokume n	1 dokum en	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	8.000.000
2	2 3	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	1 dokume n	1 dokum en	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Sistem Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	5.500.000

2	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah DPA SKPD yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	4.999.772	4.999.772	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	6.500.000
2	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	5.500.000
2	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	3 dokumen	3 dokumen	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	5.500.000
2	2	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	17.280.512	17.280.512	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	30.250.000
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>3.321.895.000</b>	<b>3.321.895.000</b>				<b>4.463.161.800</b>
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah ASN yang dibayar Gaji dan tunjangan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	25 orang / 14 bulan	25 orang / 14 bulan	100 %	100 %	3.314.185.000	3.314.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	4.448.661.800
2	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	4.460.000	4.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	5.500.000

2	2	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan SKPD yang tersusun	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	5.500.000	
2	2	0	2.0	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.60 Skor	48.60 Skor	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	3.250.000	3.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	48.60 Skor	3.500.000	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												<b>0</b>	<b>0</b>				<b>105.000.000</b>
2	2	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase pegawai yang meingkat kapasitasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	4 Orang	4 Orang	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	00	10.000.000	
2	2	0	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase pegawai yang meingkat kapasitasnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	50 Orang	50 Orang	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	00	95.000.000	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												<b>206.061.200</b>	<b>206.061.200</b>				<b>433.050.000</b>
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	8 jenis / 12 bulan	8 jenis / 12 bulan	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	15.000.000	

2	2 3	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	11 unit	11 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	36.300.000
2	2 3	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Reformasi Birokrasi	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	19 jenis / 12 bulan	19 jenis / 12 bulan	100 %	100 %	7.554.700	7.554.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	12.000.000
2	2 3	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	3 jenis / 12 bulan	3 jenis / 12 bulan	100 %	100 %	104.650.500	104.650.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	137.500.000
2	2 3	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jenis barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	8 jenis / 12 bulan 7000 lembar	8 jenis / 12 bulan 7000 lembar	100 %	100 %	18.053.500	18.053.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	24.200.000
2	2 3	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jenis surat kabar yang tersedia	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	8 jenis / 12 bulan	8 jenis / 12 bulan	100 %	100 %	18.412.500	18.412.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	24.200.000

2	2	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah tamu yang terfasilitasi	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	25 orang	25 orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	1.250.000
2	2	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	105 kegiatan	105 kegiatan	100 %	100 %	52.390.000	52.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	182.600.000
2	2	0	2.0	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											0	0	<b>112.750.000</b>			
2	2	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	0 0	1 unit	1 unit	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	0 0	36.850.000
2	2	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah mebel yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	0 0	14 unit	14 unit	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	0 0	12.100.000
2	2	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas (%)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	0 0	6 unit	6 unit	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	0 0	63.800.000
2	2	0	2.0	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											422.590.000	422.590.000	<b>451.986.000</b>			



2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah surat dinas yang terkirim	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	500 surat	500 surat	100 %	100 %	4.590.000	4.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	7.986.000
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	4 jenis / 12 bulan	4 jenis / 12 bulan	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	137.500.000
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	20 jenis	20 jenis	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	12.500.000
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	23 orang / 12 bulan	23 orang / 12 bulan	100 %	100 %	318.000.000	318.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	294.000.000
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>0</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>210.556.516</b>	<b>210.556.516</b>					<b>307.000.000</b>
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	24 unit	24 unit	100 %	100 %	112.318.620	112.318.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	165.000.000
2	2	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah mebel yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	20 unit	20 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	20.000.000

2	2	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	22 unit	22 unit	100 %	100 %	14.860.000	14.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	22.000.000
2	2	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.52 Skor	56.52 Skor	2 unit	2 unit	100 %	100 %	83.377.896	83.377.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi	56.52 Skor	100.000.000
2	2	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>											<b>275.000.000</b>	<b>274.900.000</b>					<b>1.619.268.930</b>
2	2	0	2.01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>131.251.000</b>	<b>130.951.000</b>					<b>1.146.005.180</b>
2	2	0	2.0	0	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Persentase perpustakaan sesuai standard	Jenis layanan perpustakaan yang berkembang dan terpelihara	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.28 persen	2.28 persen	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan sesuai standard	2.28 persen	52.500.000
2	2	0	2.0	0	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standard	Tipe perpustakaan daerah	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.28 persen	2.28 persen	1 tipe	1 tipe	100 %	100 %	0	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan sesuai standard	2.28 persen	262.500.000
2	2	0	2.0	0	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standard	Jumlah perpustakaan sekolah, desa, kecamatan dan taman baca masyarakat yang terbina	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.28 persen	2.28 persen	75 unit	75 unit	100 %	100 %	0	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan sesuai standard	2.28 persen	31.500.000

2	2	0	2.0	0	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standard	Jumlah perpustakaan OPD, ormas, lembaga keagamaan, ponpes yang terbina	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.28 persen	2.28 persen	15 unit	15 unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standard	2.28 persen	7.875.000
2	2	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standard	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas perpustakaan	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.28 persen	2.28 persen	120 orang	120 orang	100 %	100 %	0	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standard	2.28 persen	121.275.000
2	2	0	2.0	0	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standard	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten yang berkembang Jumlah perpustakaan rujukan yang berkembang	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.28 persen	2.28 persen	4 layanan 1 unit	4 layanan 1 unit	100 %	100 %	131.251.000	130.551.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standard	2.28 persen	330.750.000
2	2	0	2.0	0	Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan sesuai standard	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.28 persen	2.28 persen	7480 eksempl	ar7480 eksempl	ar100 %	100 %	0	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standard	2.28 persen	334.092.680
2	2	0	2.0	1	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standard	Jumlah database perpustakaan yang tersusun	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.28 persen	2.28 persen	4 database	4 database	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perpustakaan sesuai standard	2.28 persen	5.512.500
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>143.749.000</b>	<b>143.949.000</b>				<b>473.263.750</b>

2	2 3	0 2	2.0 2	0 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat yang dilaksanakan (kegiatan)	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.35 skor	55.3 5 skor	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	0	100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55.35 skor	141.395.625
2	2 3	0 2	2.0 2	0 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan yang tersusun	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.35 skor	55.3 5 skor	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55.35 skor	105.000.000
2	2 3	0 2	2.0 2	0 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Jumlah penerima penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.35 skor	55.3 5 skor	4 perpustakaan	n4 perpustakaan	n100 %	100 %	0	100.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55.35 skor	78.750.000
2	2 3	0 2	2.0 2	0 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan literasi berbasis inklusi sosial	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.35 skor	55.35 skor	100 orang	100 orang	100 %	100 %	43.749.000	43.749.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55.35 skor	63.118.125
2	2 3	0 2	2.0 2	0 5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan duta baca tingkat kabupaten	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55.35 skor	55.35 skor	20 orang	20 orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55.35 skor	85.000.000
2	2 3	0 3			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>											0	100.000				57.500.000
2	2 3	0 3	2.01		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>											0	100.000				37.000.000

2	2	0	2.0	0	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase peningkatan naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	0 kegiatan	0 kegiatan	0%	0%	0	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	00	22.000.000	
2	2	0	2.0	0	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase peningkatan naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmed	Persentase naskah kuno yang iadilestarikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	0 naskah	0 naskah	0%	0%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	00	15.000.000	
2	2	0	2.0		<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											0	0					<b>20.500.000</b>
2	2	0	2.0	0	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase peningkatan naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang terseleksi dan tersedia	Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	75 eksemplar	75 eksemplar	0%	0%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	00	17.500.000	
2	2	0	2.0	0	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase peningkatan naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang terolah	Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	75 eksemplar	75 eksemplar	0%	0%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	00	3.000.000	
2	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>											75.000.000	75.000.000					<b>923.040.000</b>
2	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>											65.000.000	65.000.000					<b>748.900.000</b>
2	2	0	2.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>											43.000.000	43.000.000					<b>364.548.000</b>

2	2	0	2.0	0	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan	Persentase arsip dinamis yang terkelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.7 persen	17.7 persen	500 berkas	500 berkas	100 %	100 %	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17.7 persen	25.920.000
2	2	0	2.0	0	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah arsip dinamis yang terpelihara Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase arsip dinamis yang terkelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.7 persen	17.7 persen	460 berkas 46 berkas 46 berkas	460 berkas 46 berkas 46 berkas	100 %	100 %	14.500.000	14.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17.7 persen	218.628.000
2	2	0	2.0	0	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	Persentase arsip dinamis yang terkelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.7 persen	17.7 persen	5 rekomendasi	5 rekomendasi	100 %	100 %	13.500.000	13.500.000			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17.7 persen	120.000.000
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>				<b>108.000.000</b>	
2	2	0	2.0	0	Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Persentase arsip statis yang terkelola	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.7 persen	17.7 persen	500 berkas 500 berkas	500 berkas 500 berkas	100 %	100 %	17.000.000	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17.7 persen	108.000.000
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2.0</b>	<b>3</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>											<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>				<b>276.352.000</b>	
2	2	0	2.0	0	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam JIKD melalui SIKD	Persentase Aktivitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.7 persen	17.7 persen	3 berkas	3 berkas	100 %	100 %	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17.7 persen	150.000.000

2	2	0	2.0	0	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah pengunjung pameran kearsipan	Persentase Aktivitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.7 persen	17.7 persen	0 orang	0 orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17.7 persen	126.352.000	
2	2	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>												10.000.000	10.000.000				154.140.000
2	2	0	2.01		<b>Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun</b>												10.000.000	9.900.000				30.000.000
2	2	0	2.0	0	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang ditetapkan untuk dimusnahkan	Persentase arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.45 persen	6.45 persen	1000 berkas	1000 berkas	100 %	100 %	10.000.000	9.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	6.45 persen	30.000.000	
2	2	0	2.02		<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>												0	0				41.640.000
2	2	0	2.0	0	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah arsip yang terselamatkan akibat bencana	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan akibat bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	0 berkas	0 berkas	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	00	41.640.000	
2	2	0	2.03		<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>												0	100.000				37.000.000
2	2	0	2.0	0	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah arsip OPD yang digabung yang terselamatkan	Persentase arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran desa yang diselamatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	0 berkas	0 berkas	0 %	0 %	0	100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	00	25.000.000	

2	2	0	2.0	0	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa	Jumlah arsip OPD yang dibubarkan yang nterselamatkan	Persentase arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran desa yang diselamatkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	0 berkas	0 berkas	0%	0%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tingkat keberad dan keutuhan a sebagai bahan pertanggung gjava	aan rsoipo ban	12.000.000
2	2	0	2.0		<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>											0	0				<b>45.500.000</b>
2	2	0	2.0	0	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa	Jumlah arsip statis yang ndiautensifikasi	Persentase arsip statis yang diautensifikasi dan arsip hasil alih media	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	0 berkas	0 berkas	0%	0%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tingkat keberad dan keutuhan a sebagai bahan pertanggung gjava	aanrsip 0 ban	19.250.000
2	2	0	2.0	0	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawa	Jumlah arsip hasil alih media	Persentase arsip statis yang diautensifikasi dan arsip hasil alih media	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	00	00	0 berkas	0 berkas	0%	0%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	tingkat keberad dan keutuhan a sebagai bahan pertanggung gjava	aan rsip 0 0 ban	26.250.000
2	2	0			<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>											0	0				<b>20.000.000</b>
2	2	0	2.		<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>											0	0				<b>20.000.000</b>
2	2	0	2.0	0	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip	Jumlah SOP penggunaan arsip bersifat tertutup yang tersusun	Persentase capaian penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup dibanding target yang ditentukan pada tahun berkenaan		0%	0%	0 dokume n	0 dokum en	0%	0%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penerbitan izin penggunaa n arsip	0%	10.000.000



2	2	0	2.0	0	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip	Jumlah pengajuan izin penggunaan arsip bersifat tertutup yang dilayani	Persentase capaian penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup dibanding target yang ditentukan pada tahun berkenaan	0 %	0 %	0 berkas	0 berkas	0 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip	0 %	10.000.000
<b>TOTAL</b>																<b>4.563.383.000</b>	<b>4.563.383.000</b>		<b>8.559.006.730</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 ini adalah :

1. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2022;
2. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memuat Program, kegiatan dan sub kegiatan yang sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

#### **4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seluruh Bidang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan sebaik - baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022.

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKAP maupun DPPA untuk tahun 2022.